KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polemik Tuntas RUU TPKS Segera Dibahas
Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Polemik Tuntas RUU TPKS Segera dibahas

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bisa langsung berjalan setelah pembukaan masa sidang. Melalui keputusan di Badan Musyawarah (Bamus), DPR tinggal menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas.

Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, hari ini, hanya beragenda tunggal, yakni hanya pidato pembukaan.

"Saya pikir sudah selesai tinggal tunjuk AKD yang bahas di Bamus berikut nanti tinggal dilakukan pembahasan oleh AKD yang ditunjuk. Saya pikir tidak perlu menjadi polemik lagi dan akan segera kami agendakan secepatnya setelah pembukaan karena Bamus baru bisa diadakan setelah pembukaan masa sidang," tutur Sufmi, kemarin.

Dihubungi terpisah, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU TPKS sudah sangat siap. Kendati begitu, Ketua DPR yang akan membacakan surat presiden sangat dinantikan agar dapat langsung tancap gas membahas RUU tersebut.

"Kita tunggu nanti saat rapat paripurna pimpinan akan bacakan dulu surat presidennya, baru kita tancap gas," ungkapnya.

Willy menerangkan DPR dan pemerintah sudah sangat siap dalam menyelesaikan RUU TPKS yang sudah sangat mendesak dan dibutuhkan tersebut. Tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan.

"Bisa langsung dibahas, tidak perlu lagi menunggu untuk diagendakan karena sudah sangat siap. Tinggal tunggu dari pimpinan saja," tukasnya.

Pemerintah mengatakan masih menunggu undangan dari DPR untuk membahas RUU TPKS. Sebelum memasuki masa reses, pemerintah telah menyelesaikan dan menyerahkan kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

Pada Minggu (13/3), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap surat presiden (supres) untuk membahas RUU TPKS yang telah disampaikan kepada DPR dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai pembacaan surpres sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui tahapan pembahasan RUU TPKS.

Selain itu, pembacaan surpres merupakan pengantar pembahasan tingkat pertama. Pembahasan dilakukan perwakilan pemerintah bersama AKD yang ditugasi.

Siti pun meminta masyarakat turut memantau pembahasan RUU TPKS hingga tuntas dan disahkan menjadi undang-undang. (Su/P-2)